

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026



RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah kami selesaikan penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan rencana program kerja tugas dan kegiatan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 ini. Sebagai wujud pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara lain dengan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya dalam Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kami merasa bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangannya. namun kami telah berusaha baik dalam perencanaan, penganggaran dan indikator kinerja telah kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kami mengharapkan masukan dan saran bagi para pembaca/Instansi terkait untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Karanganyar , September 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	21
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peluang	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	33
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Dispermades	33
3.3. Program dan Kegiatan	35
3.4. Tantangan dan peluang.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	36
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36
BAB V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program Tahun 2024.....	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	10
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan	21
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23
Tabel 2.6	Penelaahan Usulan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2026	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar	34
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara kelembagaan, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (community based development), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2024 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan OPD, serta rencana pembangunan OPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja OPD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan penjabaran RPD. Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh OPD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja OPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di OPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DISPERMADES) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dispermades Kabupaten Karanganyar untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan

aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dispermades Kabupaten Karanganyar disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dispermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dispermades, yang menyangkut aspek:
 - a. Kondisi pelayanan Dispermades;
 - b. Organisasi dan Tugas Fungsi Dispermades;
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun sebelumnya;
 - d. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dispermades;
 - e. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dispermades;
 - f. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dispermades;
 - g. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
 - h. Rancangan awal RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2026;
 - i. Informasi lain terkait pelayanan Dispermades.
2. Analisis gambaran pelayanan Dispermades;
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dispermades adalah:
 - a. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dispermades sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
 - b. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
 - c. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dispermades untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
 - d. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
 - e. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Dispermades;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun lalu berdasarkan Renstra Dispermades;
Review hasil evaluasi mencakup:
 - a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - b. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - c. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
 - d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dispermades dan kinerja pelayanan Dispermades;

- f. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Dispermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
 - b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dispermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dispermades;
 - c. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Dispermades dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
 - d. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dispermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades;
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dispermades.
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :
- a. Sejauh mana tingkat kinerja Dispermades terhadap pelayanan Masyarakat.
 - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dispermades.
 - c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs
 - d. Tantangan, hambatan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dispermades.
 - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tolok ukur, target sasaran program kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan untuk Dispermades.
Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:
- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
 - b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
 - c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dispermades.
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Untuk melaksanakan kegiatan Dispermades mengacu pada Renstra Dispermades tahun 2025- 2026. Selain itu juga memperhatikan hasil musrenbang secara berjenjang yang dilaksanakan secara rutin mulai dari dusun, desa dan kecamatan diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun semua program kegiatan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang tertuang dalam RKP Desa termasuk sumber pembiayaannya baik didanai dari swadaya masyarakat maupun dari sumber dana dari pemerintah (desa/kelurahan, Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat).

8. Perumusan kegiatan prioritas;
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, serta berdasarkan usulan masyarakat berupa pengajuan proposal yang telah masuk ke Dispermades untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades dalam pembangunan daerah melalui fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa.
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dispermades;
Penyusunan dokumen rancangan Renja Dispermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen. Rancangan Renja Dispermades tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan yang dibahas dalam forum OPD kabupaten.
10. Telaahan Kebijakan Nasional;
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa.
11. Penyempurnaan rancangan Renja Dispermades;
Penyempurnaan rancangan Renja Dispermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD Kabupaten.
12. Pembahasan forum OPD;
Pembahasan dalam forum OPD kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dispermades dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan.
13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dispermades dengan hasil pembahasan forum OPD.
Dokumen rancangan Renja Dispermades yang telah didiskusikan dalam forum OPD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum OPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Dispermades adalah sebagai berikut:

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).
 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dispermades adalah sebagai pedoman bagi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam rangka merumuskan program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dispermades untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dispermades Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2026;
2. Memaparkan tujuan sasaran dan indikator hasil (Outcome) dari program dan kegiatan termasuk jumlah anggaran untuk pelaksanaan selama tahun anggaran 2026;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dispermades Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Dispermades
- 3.3. Tantangan dan Peluang Dispermades

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar melaksanakan 4 program, 4 kegiatan dan 21 sub kegiatan sesuai Nomenklatur Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 22.702.581.246,- adapun realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 22.210.283.701,- atau terserap 97,83 persen. Jika dilihat dari capaian kinerja program pada tahun 2024 dari 4 program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semuanya tercapai 100 persen, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Tahun 2024

Program	Indikator Program	Satuan	Sasaran dan realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	%	100	100	100	100	N/A
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	95	995	100	96	N/A
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	%	100	100	100	N/A	N/A
	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	%	84	84	100	85	N/A
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	%	100	100	100	N/A	N/A

	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	%	80	80	100	82	N/A
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%	100	100	100	100	N/A

Secara keseluruhan target indikator baik program, kegiatan maupun sub kegiatan tahun 2024 hampir tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang belum tercapai, salah satunya pembentukan kawasan perdesaan yang masih menjadi perhatian dalam pencapaian target.

Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra pada akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berjalan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	
				Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Berjalan 2025	Tingkat capaian Target Renstra Tahun Berjalan 2025 (TW I)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	0,7108	N.A	0,7088	0,7378	103%	0,7108		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>N.A</i>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	N.A
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	N.A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	N.A
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan dokumen keuangan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>N.A</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	100%	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	N.A
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>100 Persen</i>	<i>100 Persen</i>	<i>100 Persen</i>	<i>100 Persen</i>	<i>100%</i>	<i>100 Persen</i>	<i>100 Persen</i>	<i>N.A</i>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	N.A

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	N.A
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	N.A
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	N.A
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	N.A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100%	24 dokumen	24 dokumen	N.A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	N.A
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	N.A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	N.A
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	N.A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	N.A
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit	100%	43 unit	43 unit	N.A
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	N.A
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit	25 unit	N.A
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	N.A
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	N.A
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Desa 1500 titik lokasi	162 Desa 1500 titik lokasi	162 Desa 1500 titik lokasi	162 Desa 1500 titik lokasi	100%	162 Desa 1500 titik lokasi	162 Desa 1500 titik lokasi	N.A
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Dea	162 Dea	162 Dea	162 Dea	100%	162 Dea	162 Dea	N.A
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1500 titik lokasi	1500 titik lokasi	1500 titik lokasi	1500 titik lokasi	100%	1500 titik lokasi	1500 titik lokasi	N.A
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	97 %	97 %	N.A
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	N.A
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	100 Persen 84 Persen	100 Persen 84 Persen	100 Persen 84 Persen	100 Persen 84 Persen	100% 100%	100 Persen 86 Persen	100 Persen 86 Persen	N.A
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah desa tertib pengelolaan aset Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa</i>	<i>162 Desa 162 Desa</i> <i>1 Desa</i>	<i>162 Desa 162 Desa</i> <i>1 Desa</i>	<i>162 Desa 162 Desa</i> <i>1 Desa</i>	<i>162 Desa 162 Desa</i> <i>1 Desa</i>	100% 100% 100%	<i>162 Desa 162 Desa</i> <i>1 Desa</i>	<i>162 Desa 162 Desa</i> <i>1 Desa</i>	N.A
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	N.A
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	N.A
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	162 orang	162 orang	162 orang	100%	162 orang	162 orang	N.A
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	N.A
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	N.A
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	N.A
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	N.A
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	162 orang	162 orang	162 orang	100%	162 orang	162 orang	N.A
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	177 dokumen	177 dokumen	177 dokumen	100%	177 dokumen	177 dokumen	N.A
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 Persen 80 Persen 100 Persen							

<i>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>									
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	N.A
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	N.A
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	N.A
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	N.A
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	N.A

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan tahun 2024 dapat dilihat tabel 2.3. pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan target indikator baik indikator tujuan, sasaran maupun program tercapai, ada salah satu indikator yang belum tercapai target semisal nilai SAKIP. Realisasi nilai SAKIP hal tersebut salah satunya dikarenakan variabel penilaian nilai SAKIP ada beberapa perubahan sehingga nilai SAKIP Dispermades maupun beberapa OPD lain di Kabupaten Karanganyar sebagian besar masih kriteria B, pada tahun 2025 dilakukan koreksi target nilai SAKIP sesuai dengan Renstra 2025-2026.

Berdasarkan Renstra 2025-2026 Indikator Tujuan, Sasaran, Maupun Program ada Sebagian besar mengalami perubahan. Hal tersebut disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	SPMstandar Nasional	IKK	Target Kinerja Tahun Ke-		Realisasi	
					2024	2025	2024	2025 Tw 1
A.	Indikator Tujuan (Renstra 2021-2024)							
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks			-		-	N/A
2.	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks			N/A		N/A	N/A
3.	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks			N/A		N/A	N/A
4.	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks			N/A		N/A	N/A
	Indikator Tujuan (Renstra 2024-2026)							
1.	Angka Kemiskinan	%			8,52		9,79	N/A
2.	Indeks reformasi Birokrasi	Indeks			72		70,91	N/A
	Indikator Sasaran (Renstra 2021-2024)							
1.	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	%			4,3	N/A	4,94	N/A
2.	Persentase desa tertib administrasi	%			83	N/A	83,3	N/A

3.	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang				17,1	N/A	17,54	N/A
4.	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %				18	N/A	17,15	N/A
5.	Nilai SAKIP				79	N/A	69,35	N/A
Indikator Sasaran (Renstra 2024-2026)								
1.	Indeks Desa Membangun				0,7088	0,7108	0,7378	N/A
2.	Nilai SAKIP				73	74	71,40	N/A
Indikator Program					2024	2025	2024	2025 Tw.1
1.	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	Persen			N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen			95	96	95	N/A

3.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	Persen			84	85	84	N/A
4.	% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	Persen			80	82	80	N/A
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen			100	100	100	N/A
5.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya				100	100	100	N/A

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berbagai isu-isu strategis dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terkait dengan pelaksanaan program-program utama, yaitu :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :

Tabel 2.4.
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pemerataan pembangunan desa	1. Aparat desa yang tidak menguasai materi pembangunan desa 2. Aparat desa belum optimal dalam implementasi pembangunan desa	1. Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas aparat desa 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar terkait dengan sasaran pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2026 yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan social dengan indikator angka kemiskinan. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pencapaian tugas dan fungsi diantaranya

1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Terbatasnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Program CSR).

Faktor pendorong yang mendukung tugas fungsi antara lain:

1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT.
2. Terjalannya kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa.
3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dapat dijelaskan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Pent ing
Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Capaian Program		Pagu Indikatif 2026	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Capaian Program		Kebutuhan Dana	
		Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.237.484.674	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.237.484.674	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				19.237.484.674	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				19.237.484.674	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dispermades	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	6.075.351.586	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dispermades	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	6.075.351.586	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dispermades</i>	<i>Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>106.560.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dispermades</i>	<i>Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>106.560.000</i>	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispermades	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	102.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispermades	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	102.560.000	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Dispermades</i>	<i>Jumlah Laporan dokumen keuangan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>5.213.333.478</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Dispermades</i>	<i>Jumlah Laporan dokumen keuangan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>5.213.333.478</i>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispermades	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.213.333.478	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispermades	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.213.333.478	
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Dispermades</i>	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>100 Persen</i>	<i>10.000.000</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Dispermades</i>	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>100 Persen</i>	<i>10.000.000</i>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispermades	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispermades	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10.000.000	
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Dispermades</i>	<i>Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi</i>	<i>100 %</i>	<i>320.878.433</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Dispermades</i>	<i>Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi</i>	<i>100 %</i>	<i>320.878.433</i>	
Penyediaan Komponen Instalasi	Dispermades	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Dispermades	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispermades	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	146.703.433	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispermades	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	146.703.433	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispermades	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispermades	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispermades	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	4.620.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispermades	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	4.620.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispermades	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	148.820.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispermades	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	148.820.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.735.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.735.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispermades	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	169.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispermades	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	169.800.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispermades	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	43 unit	254.779.675	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispermades	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	43 unit	254.779.675
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispermades	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	204.415.675	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispermades	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	204.415.675
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispermades	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispermades	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispermades	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispermades	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000
PROGRAM PENATAAN DESA	Dispermades	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 %	195.000.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Dispermades	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 %	195.000.000
Penyelenggaraan Penataan Desa	Dispermades	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Desa 1500 titik lokasi	195.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Dispermades	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Desa 1500 titik lokasi	195.000.000
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Dispermades	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Desa	35.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Dispermades	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Desa	35.000.000
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dispermades	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1500 titik lokasi	160.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dispermades	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1500 titik lokasi	160.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dispermades	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	97 %	95.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dispermades	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	97 %	95.000.000
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dispermades	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	3 dokumen	95.000.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dispermades	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	3 dokumen	95.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dispermades	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dispermades	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dispermades	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dispermades	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dispermades	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	100 Persen 86 Persen	4.190.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dispermades	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	100 Persen 86 Persen	4.190.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermades	Jumlah desa tertib pengelolaan aset Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	162 Desa 162 Desa 1 Desa	4.190.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermades	Jumlah desa tertib pengelolaan aset Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	162 Desa 162 Desa 1 Desa	4.190.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.260.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.260.000.000

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dispermades	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dispermades	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 dokumen	25.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 dokumen	25.000.000	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	50.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	25.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dispermades	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dispermades	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dispermades			8.682.133.088	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dispermades			8.682.133.088	
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dispermades</i>			<i>8.682.133.088</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dispermades</i>			<i>8.682.133.088</i>	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	100.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dispermades	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	5.500.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dispermades	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	5.500.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	80.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	80.000.000	

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	70.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	70.000.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 laporan	1.932.133.088	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 laporan	1.932.133.088	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat yang bersifat pemberdayaan diakomodir oleh Bapperlibang melalui Musrenbangcam, kemudian Dispermades menampung usulan yang telah masuk untuk dipelajari, ditelaah dan diusulkan sebagai kegiatan yang akan dianggarkan dalam program di tahun berikutnya.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam) terdapat beberapa Usulan yang ditujukan ke Dispermades Kabupaten Karanganyar, namun mendasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekarang hanya ada 4 Program yang terdiri dari :

1. Program Penataan Desa (1 kegiatan, 7 sub Kegiatan)
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 kegiatan, 2 sub kegiatan)
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa (1 kegiatan, 12 sub kegiatan)
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1 kegiatan, 6 sub kegiatan)

Sementara usulan yang masuk ke Dispermades terdapat 83 usulan, Adapun perincian data usulan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Penelaahan Usulan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Permasalahan	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	5
1	Sarpras Posyandu	Kel.tegal gede	bantuan peralatan kipas angin	150.000.000	
2	Pembinaan Kemasyarakatan	Desa Nangsri	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	35.000.000	Sesuai urusan
3	Pengecoran Jalan Usaha Tani	Jalan selatan podok - timur kwarasan	Memperlancar arus transportasi	135.000.000	
4	Pemeliharaan Jalan	Desa Pandeyan	Memperlancar Transportasi	700.000.000	
5	Koperasi Tani	Desa Pandeyan	Tersedianya Penyertaan Modal Bidang Pertanian	100.000.000	
6	Pengecoran Jalan Usaha Tani	Jalan selatann podok - timur kwarasan	Memperlancar arus transportasi	135.000.000	
7	Pelatihan komputer untuk Perangkat Desa (lab komputer)	Desa Ngasem	optimalisasi kinerja Perangkat Desa		Sesuai urusan
8	Peningkatan kapasitas Kades, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa	Desa Malangjiwan	Peningkatan kualitas SDM		Sesuai urusan
9	Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD	Desa Malangjiwan	Peningkatan kualitas SDM		Sesuai urusan

10	Pengembangan Kios Desa	Desa Jatikuwung	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	500.000.000	
11	Talud Jalan Tembus Ngangkruk - Siwal	Dusun Ngangkruk - Mundu	Memperlancar transportasi	860.625.000	
12	Pengembangan Pasar Desa	Desa Selokaton	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	500.000.000	
13	Perbaikan Kantor Desa	Desa Selokaton	Peningkatan Pelayanan	400.000.000	
14	Pembangunan Wisata Desa SEBALONG	Serenan RT. 004/003	Peningkatan Pendapatan Desa	5.000.000.000	
15	Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan solo	Bodo, Karangwuni, Ngabeyan, Geretan	Penanggulangan Banjir	500.000.000	
16	Pembangunan Kios Pasar Desa	Ngabeyan RT. 001/005	Peningkatan Pendapatan Desa	500.000.000	
17	Pembangunan Kolam Renang Agrowisata Desa	Serenan RT. 004/003	Peningkatan Pendapatan Desa	1.000.000.000	
18	Penyertaan Modal BUMDesa NGUDI REJEKI	Desa Kragan	Menciptakan Desa Mandiri	500.000.000	Sesuai urusan
19	Pembentukan BUMDESMA	Kecamatan	Menciptakan Desa Mandiri	5.000.000	Sesuai urusan
20	Pengelolaan Sampah Pembuangan Sampah Desa Selokaton	Desa Dayu	Pengelolaan Sampah yang Memadai	500.000.000	
21	Perbaikan Kantor Desa	Desa Dayu	Peningkatan Pelayanan	400.000.000	
22	Betonisasi Jalan	Dusun Gondangrejo ke Dusun Jatikuwung	Memperlancar Transportasi	400.000.000	
23	Betonisasi Jalan	Dusun Jatikuwung - Terek - Dusun Winong	Memperlancar Transportasi	200.000.000	
24	Betonisasi dan Talud Jalan	Jatikuwung	Memperlancar Transportasi	320.000.000	
25	Rabat Beton Jalan Desa Mundu - Rejosari (V:797x8x0,12)	Dusun Mundu ke Desa Rejosari	Memperlancar transportasi	765.120.000	
26	Rabat beton Jalan Lingkar Dusun (V; 432x3x0,12)	Dusun Mundu	Memperlancar transportasi	155.520.000	
27	Perbaikan Kantor Desa	Desa Selokaton	Meningkatkan Pelayanan	300.000.000	
28	Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan solo	Bodo, Karangwuni, Ngabeyan, Geretan	Penanggulangan Banjir	105.000.000	
29	Rehabilitas Balai Desa	Kragan RT 001/002	Kualitas Pelayanan Masyarakat Desa	500.000.000	
30	Gamelan	Kantor Kepala Desa Kragan	Pelestarian Budaya	200.000.000	

31	Penyertaan Modal BUMDES	Desa Tuban	Manambah PAD	500.000.000	Sesuai urusan
32	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa		Peningkatan SDM	50.000.000	Sesuai urusan
33	Mesin Setemper Kuda		Peningkatan Ekonomi	375.000.000	
34	Mesin Sunduk Sate		Peningkatan Ekonomi	120.000.000	
35	Bantuan Sarana Prasarana	Desa Malangjiwan	Peningkatan Untuk Desa Wisata yang ada di Kecamatan tawangmangu Yang meliputi Desa Nglebak dan Desa Tengklik	200.000.000	
36	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Mojoroto	Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	250.000.000	
37	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Kaliboto	Rehabilitasi Kantor Desa	300.000.000	
38	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Kaliboto	Pembangunan Pendopo	250.000.000	
39	Fisik Sarana Prasarana / Bantuan Alat/Pendampingan	Desa Kaliboto	Pengembangan Desa Digital	50.000.000	
40	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Munggur	Rehabilitasi Gedung Lembaga	100.000.000	
41	Fisik Sarana Prasarana / Bantuan Alat/Pendampingan	Desa Munggur	Pengembangan Desa Digital	200.000.000	
42	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Munggur	Rehabilitasi Gedung PKD	150.000.000	
43	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Ngadirejo	Pembangunan Gedung Kantor Desa	500.000.000	
44	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Kantor Desa Mojogedang Kec.Mojogedang	Pembangunan kantor pelayanan Desa	600.000.000	
45	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Komplek kantor desa Gentungan, Kab. Karanganyar	rehab kantor desa	300.000.000	
46	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Balai Desa Kedungjeruk	pembangunan mushola di kantor desa	250.000.000	
47	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Dusun Bendo , Pojok	Pembangunan Pagar Kantor Desa	300.000.000	
48	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Bendosari RT 02 RW 09 ,Pendem, Kab. Karanganyar	Pembangunan/Rehab Kantor Desa	1.000.000.000	
49	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Pereng, Kab. Karanganyar	Pembangunan/Rehab Kantor Desa	500.000.000	

50	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Dusun Sarirejo Desa Pereng, Kab. Karanganyar	Pagar Keliling Pekarangan Kantor Desa Pereng.	500.000.000	
51	Peningkatan Perekonomian di Desa	Desa Munggur	Pembangunan kios dan pengembangan kawasan ekonomi Timur SMP N 1	500.000.000	
52	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Mojoroto	Pengembangan Wisata Sendang Bejen	200.000.000	
53	Pengembangan Acara Adat Desa	Desa Kaliboto	Sosialisasi Kegiatan Budaya adat	100.000.000	
54	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Kaliboto	Pelatihan Seni	100.000.000	
55	Perencanaan Kampung Olahraga	Desa Kaliboto	Desa menjadi sport Center	200.000.000	
56	Peningkatan Fisik Sarana Prasarana	Desa Ngadirejo	Pembangunan GedungBolo Pecah Nglebak	150.000.000	
57	Peningkatan Fisik Sarana Prasarana	Desa Sewurejo	Pembangunan Gedung Kemasyarakatan Timur Nglebak RT 06	150.000.000	
58	Peningkatan Fisik Sarana Prasarana	Desa Sewurejo	Penyempurnaan Gedung Pertemuan Sidorejo	150.000.000	
59	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Sewurejo	Pembelian seperangkat Gamelan / Alat musik Tradisional	Rp. 400.000.000,-	
60	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Mojogedang	Pembangunan Lapangan Olahraga Desa	500.000.000	
61	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Gentungan	pengadaan merak reog	100.000.000	
62	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Gentungan	Lapangan Karangayam	500.000.000	
63	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Kedungjeruk	pelatihan seni karawitan bagi masyarakat umum	500.000.000	
64	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Gebyok	pembangunan lapangan bola voly desa gebyog	300.000.000	
65	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Gebyok	pembangunan lapangan sepakbola desa Gebyog	500.000.000	
66	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Pojok	Pengadaan Alat kesenian di Desa Pojok	300.000.000	
67	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Pendem	pembangunan dan perbaikan lapangan desa	1.000.000.000	
68	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Pendem	Pengadaan alat seni karawitan untuk menunjang	300.000.000	

			kemajuan desa wisata		
69	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Pendem	Pengadaan sarana prasarana Reog untuk memajukan wisata desa	300.000.000	
70	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Pereng	Sarana prasarana pendukung kesenian Karawitan/Gamelan, dan lokasi latihan.	300.000.000	
71	Program Pengembangan Sarana Pertanian	Dusun Kopenan, Desa Kebak	Macadam JUT Mburet	150.000.000	
72	Program Pengembangan Sarana Pertanian	Dusun Kopenan, Desa Kebak	Macadam JUT Barat Kopenan	150.000.000	
73	Program Pengembangan Sarana Pertanian	Dusun Kebak, Desa Kebak	Macadam JUT Wonorejo - Tiris	100.000.000	
74	Program perekonomian dan pembangunan	Dusun Kopenan, Desa Kebak	gorong-gorong Tiris RT 001 RW 004	100.000.000	
75	Program perekonomian dan pembangunan	Dusun Kopenan, Desa Kebak	Talud Tiris RT 001 RW 004	100.000.000	
76	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Desa Tugu	25.000.000	
77	Pembangunan kantor dan aula Desa Segorogunung		desa segorogunung	500.000.000	
78	Pengadaan Komputer dan server		Desa Puntukrejo	30.000.000	
79	Pengadaan prasarana kantor Desa		Desa Puntukrejo	400.000.000	
80	Rehab Kantor Pemerintah Desa		Desa Berjo	500.000.000	
81	Rehab Kantor Pemerintah Desa		Desa Segorogunung	1.000.000.000	
82	Rehab Kantor Pemerintah Desa		Desa Dukuh	1.350.000.000	
83	Pengadaan PVC Kantor Desa		Desa Ngargoyoso	200.000.000	
TOTAL				32.116.265.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan Pembangunan Nasional agar kesenjangan pendapatan menjadi kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik.

Penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dispermades mempunyai peran yang penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan keberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dispermades

Dispermades Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menetapkan rencana Kerja (RENJA) mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar baik Tujuan maupun Sasaran Daerah.

Adapun tujuan serta sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Satuan	Target 2026
Meningkatnya kualitas pembangunan desa dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa		Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes	Indeks	0,7445
	Meningkatnya capaian Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes	Persen	20,99
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,625

3.3. Program dan Kegiatan

- a) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Dalam menetapkan program dan kegiatan ada beberapa pertimbangan diantaranya :
1. Tujuan dan Sasaran dalam RPD.
 2. Tujuan dalam renstra Dispermades
 3. Sasaran Dispermades
 4. Pencapaian SDGs khususnya tujuan ke -10 dengan indikator ;
 - a) Indikator 10.1.1.(b)
 - Jumlah desa tertinggal yang terentaskan (maju dan berkembang)
 - b) Indikator 10.1.1.(c)
 - Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal
 - c) Indikator 10.1.1.(d)
 - Jumlah Desa Mandiri
 - d) Indikator 10.1.1.(f)
 - Persentase Penduduk Miskin di daerah tertinggal
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Jumlah Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 hanya ada 4 Program yang terdiri dari (sesuai urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa) :
1. Program Penataan Desa (1 kegiatan, 2 sub Kegiatan)
 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 kegiatan, 3 sub kegiatan)
 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa (1 kegiatan, 14 sub kegiatan)
 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1 kegiatan, 6 sub kegiatan)
- Serta 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp.6.075.351.586,-

1.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan :

- a) Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.
- b) Mewujudkan kemandirian desa dengan memanfaatkan berbagai potensi sosial, ekonomi dalam Pembangunan.

Peluang :

- a) Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu.
- b) Partisipasi masyarakat dalam berswadaya maupun gotong royong dalam pembangunan di desa.
- c) Dispermades melakukan fasilitasi terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar maka Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang sudah terdapat beberapa pertimbangan diantaranya mempedomani RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2026 serta Renstra 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				19.237.484. 586				17.322.951.586
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.237.484. 586				17.322.951.586
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				19.237.484. 586				17.322.951.586
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya</i>		100%	6.075.351.586			100%	6.075.351.586
3	26	001	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	106.560.000			100%	106.560.000
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Karanganyar		0	APBD		-	0
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD</i>	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD</i>	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD</i>	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- OPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-OPD</i>	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000	
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jml Laporan	Kab. Karanganyar	4 laporan	102,560,000	APBD		4 laporan	102,560,000	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	5.213.333.478			100%	5.213.333.478
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Karanganyar	39 orang	5.213.333.478	APBD		39 orang	5.213.333.478	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	10,000,000			100%	10,000,000
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan</i>	Kab. Karanganyar	10 Orang	10,000,000	APBD		10 Orang	10,000,000	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	270.878.433			100%	270.878.433
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan	Kab. Karanganyar	10 paket	4,000,000	APBD		10 paket	4,000,000	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jml perlengkapan kantor yg tersedia</i> tersedianya alat tulis kantor cukup setiap bln <i>Tersedianya peralatan kantor yang baik</i>	Kab. Karanganyar	3 paket	146.703.433	APBD		3 paket	146.703.433	

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	Kab. Karanganyar	12 paket	15,000,000	APBD		12 paket	15,000,000
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karanganyar	24 dokumen	3,440,000	APBD		24 dokumen	3,440,000
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar.dalam daerah Tersedianya makan dan minum kantor	Kab. Karanganyar	12 laporan	100,000,000	APBD		12 laporan	100,000,000
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,735,000	APBD		1 dokumen	1,735,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	169.800.000			100%	169,800,000
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	1 laporan	5,000,000	APBD		1 laporan	5,000,000
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karanganyar	3 laporan	64,800,000	APBD		3 laporan	64,800,000
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karanganyar	3 laporan	100,000,000	APBD		3 laporan	100,000,000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	254.779.675			100%	254.779.675
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karanganyar	15 unit	204.415.675	APBD		15 unit	204.415.675
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karanganyar	27 unit	21,264,000	APBD		27 unit	21,264,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karanganyar	1 unit	29,100,000	APBD		1 unit	29,100,000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan		91,40%	195,000,000			93,80%	195,000,000
						Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana		100%				100%	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			100%	195.000.000			100%	195,000,000
								100%				100%	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Karanganyar	162 desa	35,000,000	APBD		162 desa	35,000,000
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Karanganyar	1.000 unit	160,000,000	APBD		1.000 unit	160,000,000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama		89,50	95.000.000			92,5%	220,500,000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			145 desa	95.000.000			150 desa	220,500,000
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	1 dokumen	40,000,000	APBD		1 dokumen	40,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	03	2.0 1	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
2	13	03	2.0 1	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Karanganyar	1 dokumen	30,000,000	APBD		1 dokumen	30,000,000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Persentase desa tertib administrasi pemerintahan		100% 100% 98,77%	4.190.000.000			100% 100% 98,77%	4.190.000.000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			162 desa	4.190.000.000			162 desa	4.190.000.000
2	13	04	2.0 1	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	131,000,000	APBD	131,000,000	1 dokumen	131,000,000
2	13	04	2.0 1	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Karanganyar	2 dokumen	150,000,000	APBD	150,000,000	4 dokumen	150,000,000
2	13	04	2.0 1	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	100,000,000	APBD	100,000,000	1 dokumen	100,000,000
2	13	04	2.0 1	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Karanganyar	2 Dokumen	3,260,000,000	APBD	3,260,000,000	2 Dokumen	3,260,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	04	2.0 1	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Karanganyar	60 orang	25,000,000	APBD		60 orang	25,000,000
2	13	04	2.0 1	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Karanganyar	2 laporan	25,000,000	APBD		2 laporan	25,000,000
2	13	04	2.0 1	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
2	13	04	2.0 1	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 dokumen	100,000,000
2	13	04	2.0 1	08	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Karanganyar	1 laporan	200.000.000	APBD		1 laporan	200.000.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	04	2.0 1	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Karanganyar	10 laporan	50,000,000	APBD		10 laporan	50,000,000
2	13	04	2.0 1	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Karanganyar	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
2	13	04	2.0 1	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	70,000,000	APBD		1 dokumen	70,000,000
2	13	04	2.0 1	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Karanganyar	162 orang	50,000,000	APBD		162 orang	50,000,000
2	13	04	2.0 1	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Karanganyar	177 dokumen	10,000,000	APBD		177 dokumen	10,000,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif		100%	8.682.133.088			85%	6.767.600. 000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina		100%				100%	
2	13	05	2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		3 laporan 4 desa	8.682.133.088			1 kegiatan	6.767.600.000
2	13	05	2.01	0.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Karanganyar	1 dokumen	90,000,000	APBD		3 dokumen	90,000,000
2	13	05	2.01	0.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Karanganyar	1 lembaga	6,000,00,000	APBD		1 lembaga	5,000,000,000
2	13	05	2.01	0.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Karanganyar	2 dokumen	25,000,000	APBD		2 dokumen	25,000,000
2	13	05	2.01	0.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Karanganyar	1 laporan	40,000,000	APBD		2 laporan	40,000,000
2	13	05	2.01	0.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Karanganyar	5 laporan	1.427.133.000	APBD		5 laporan	612,600,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	05	2.0 1	0.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,100,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000,000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan rencana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam periode satu tahun anggaran dan indikasi tahun anggaran berikutnya. Rencana kerja juga merupakan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan. Proses penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan seluruh komponen dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program dan Kegiatan tahun anggaran yang akan dilaksanakan serta indikasi tahun anggaran yang akan datang.

Demi mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam angka kemiskinan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dalam Tahun anggaran 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mengusulkan program kegiatan yang terfokus pada penurunan kemiskinan dengan indikator peningkatan status Indeks Desa Membangun.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang selaras dengan pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan wujud keinginan dan situasi kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya.

Apabila terdapat banyak kekurangan dalam mengajukan usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kami menerima masukan dan saran

yang bisa digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada tahun anggaran berikutnya.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

ROBER CHRISTANTO

